

STRATEGI

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS PEMBANGUNAN DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA¹

DEVELOPMENT STRATEGY OF HUMAN RESOURCES BASED ON VILLAGE DEVELOPMENT TO IMPROVE THE WELFARE VILLAGE COMMUNITIES

Hayat², Slamet Hidayat Turohman, Yaqub Cikusin

Email: hayat@unisma.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the implementation of human resource development based on the Minister of Home Affairs No. 114 of 2014 About Village Development Guidelines in Tungkulrejo Village, Padas Sub-district, Ngawi District. To Know the Supporting and Inhibiting Factors in the Implementation of Human Resource Development in Tungkulrejo Village, Padas Sub-district, Ngawi District. This research uses field research method which gives description about the implementation of human resource development in Tungkulrejo Village, Padas Subdistrict, Ngawi Regency. Data collection techniques use observation, interview or documentation techniques, by selecting subjects and informants who are involved and technically and functionally involved in human resource development. The data obtained are then analyzed qualitatively. The results of this study illustrate that; The role of village government in the development of human resources in Tungkulrejo Village, has made policy on activities that can build existing human resources. However, these activities have not been able to provide a good impact on the economy of the people of Tungkulrejo Village. Internal and external factors become an inhibiting and supporting factor in the development of human resources in Tungkulrejo Village.

Keywords: *Development, Community, Village, human Resources*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia yang berdasarkan Pemendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang memberikan gambaran mengenai implementasi

¹ Naskah Diterima 2 Mei 2018. Revisi Final 24 Oktober 2018.

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

pembangunan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, *interview* atau wawancara dan dokumentasi, dengan memilih subyek dan informan yang berperan dan terlibat secara teknis maupun fungsional dalam pembangunan sumber daya manusia. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa; peran pemerintah desa dalam pembangunan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo, telah membuat kebijakan mengenai kegiatan - kegiatan yang dapat membangun sumber daya manusia yang ada. Namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut belum mampu memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian masyarakat Desa Tungkulrejo. Faktor internal dan eksternal menjadi sebuah faktor penghambat dan pendukung dalam pembangunan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo.

Kata Kunci: Pembangunan, Masyarakat, Desa, Sumber Daya Manusia

A. PENDAHULUAN

Pembangunan menjadi unsur penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan, sejatinya tidak hanya secara fisik dan focus terhadap infrastruktur belaka, karena pembangunan infrastruktur jika tidak diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusianya, berdampak secara ekonomi, sosial maupun terhadap aspek budayanya. Oleh karena itu, pembangunan manusia menjadi sebuah keniscayaan yang harus terus ditingkatkan, agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Potensi mengembangkan sumber daya manusia dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan, keadilan, dan kebaikan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sunyoto (2004:40) kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat

mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi (sekaligus politik). Pembangunan masyarakat Desa terpadu hal yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk perdesaan serta memperkuat kemandirian. Terdapat empat elemen dasar dalam program pembangunan diantaranya adalah; (a) Pembangunan pertanian, (b) Industri perdesaan, (c) Pembangunan masyarakat desa dan (d) strategi pusat pertumbuhan. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) diatur dalam Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Bab I ketentuan umum Pasal 3 yang berbunyi "Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam bagian kedua Permendagri no 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa diatur masalah pembangunan SDM dalam poin pemberdayaan masyarakat yang mengatur tentang; *pertama* usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan

perdagangan. *Kedua* pelatihan teknologi tepat guna. *Ketiga* pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa. *Keempat* peningkatan kapasitas masyarakat. Peraturan Pemendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah peraturan mengenai pedoman pembangunan desa yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan Sumber Daya Manusia. Namun masih banyak desa yang masih belum menerapkan peraturan-peraturan yang ada dalam pemendagri, bahkan para aparatur cenderung tidak mengetahui adanya peraturan menteri dalam negeri yang baru yaitu Pemendagri No 114 tahun 2014 dalam melakukan pembangunan Desa (Pembangunan Sumber Daya Manusia).

Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, merupakan desa yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini. Desa tersebut dijadikan sebagai tempat penelitian dikarenakan berdasarkan observasi terdahulu yang peneliti lakukan, secara pelaksanaan dalam pengimplementasian pembangunan desa sudah beberapa yang telah dijalankan. Namun pembangunan fisik dan non fisik di Desa Tungkulrejo masih belum seimbang, yang mana pemerintah desa memprioritaskan pembangunan fisik ditimbang pembangunan non fisik. Pembangunan fisik di Desa Tungkulrejo sekitar 85% sudah berjalan dengan baik, aspal jalan, drainase, gapura, akses transportasi lainnya seperti jalan-jalan kampung yang sudah dipaving. Padahal pembangunan non fisik (sumber daya manusia) sangatlah penting, mengingat manusia adalah pelaku dari

pembangunan itu sendiri. Secara tidak langsung jika ASDM tidak dibangun maka yang terjadi adalah desa akan kesulitan dalam urusan pemerintahan desa seperti halnya pelayanan, peningkatan perekonomian masyarakat yang dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Tujuan dari penulisan ini adalah; *Pertama* menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia yang berdasarkan Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa di Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. *Kedua* untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi

Berdasarkan fenomena dan tujuan penulisan ini, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah; *Pertama* bagaimana implementasi permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi?. *Kedua* Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2015:6) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan

lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data di lapangan. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yang kemudian dikumpul sebagai bahan penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu (1) pengamatan, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi (Sugiyono, 2011:309)

Metode pengamatan disebut Nasution (dalam Sugiyono, 2011: 309) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Selanjutnya wawancara menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2011: 316) menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. selanjutnya dokumentasi merupakan metode yang pengumpulan datanya diperoleh dari mempelajari dokumen-dokumen data atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data diperoleh dari instansi, kantor atau tempat yang telah ditetapkan menjadi lokasi penelitian.

Data yang didapatkan tersebut lalu dianalisis supaya untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pembahasan demi menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian

ini. Teknik analisis data adalah suatu cara penelitian yang digunakan untuk menguji dan menarik kesimpulan. Analisis data merupakan bagian yang amat penting karena dengan analisis data inilah data yang dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga berhasil dalam menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diajukan dalam penelitian. Analisis data merupakan proses pengaturan data mulai dari urutan data, mengorganisasikan pola atau katagori dan uraian dasar. Miles dan Huberman (dalam Bakri, 2013:183) memaparkan prosedur analisis data diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

C. KERANGKA TEORI

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Wilson (dalam Wahab, 2016:13) merumuskan kebijakan publik sebagai “Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)”. Kebijakan publik dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap tuntutan yang timbul dari lingkungannya. Kebijakan publik sebagai keputusan yang diambil dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan norma-norma yang ada pada publik. Ukuran normatifnya adalah keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga Negara, masalah lingkungan, pelayanan, pertanggung jawaban administrasi dan analisis

yang etis. Kebijakan publik pada umumnya merupakan keputusan tindakan yang secara tidak langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, *financial* dan manusia untuk kepentingan publik. Ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa terdapat satu ruang dalam kehidupan yang bukan privat tetapi milik bersama.

Kemudian formulasi atau perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik, karena dalam tahap ini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Untuk itu, pertamakali harus disadari beberapa hal hakiki dari kebijakan publik (Nugroho, 2003:101).

1. Kebijakan publik ditunjukan untuk meleakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri.
2. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini teramat banyak kebijakan publik yang baik namun pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
3. Keterbatasan kelembagaan. Yang dimaksud sebagai keterbatasan kelembagaan adalah sejauh mana kualitas praktek manajemen profesional di dalam lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat, baik yang bergerak di bidang profit maupun nonprofit.
4. Keterbatasan klasik yang tetapi tidak kalah penting, yakni keterbatasan dana atau anggaran.
5. Keterbatasan yang bersifat teknis, yakni berkenaan dengan

kemampuan teknis menyusun kebijakan itu sendiri.

Setelah tahap formulasi kebijakan maka selanjutnya adalah pengimplementasian dari kebijakan tersebut. Van Meter dan Van Hom (dalam Wahab, 2016:135) merumuskan proses implementasi sebagai "tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat - pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". Implementasi dalam sebuah kebijakan juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam sebuah perencanaan untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan kuat, permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi

Sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja, kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai "evaluasi kebijakan". Evaluasi biasanya ditunjukan untk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan, sejauh mana tujuan dicapai dan evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Nugroho, 2003:183).

Fungsi evaluasi kebijakan menurut Samodra Wibawa dkk (dalam Nugroho, 2003:186) evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi yaitu;

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas plaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara

berbagai dimensi realitas yang diamatinya.

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar samapai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah tahap pelayanan terhadap masyarakat. Hayat (2017:22) mengatakan bahwa dalam konteks pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan publik adalah melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik menjadi suatu system yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan masyarakat.

2. Konsep Pembangunan

Pembangunan menurut Siagian "Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 2001:3). Pembangunan memang menjadi faktor utama yang harus dilaksanakan, karena dengan pembangunan baik pembangunan ekonomi, infrastruktur dan pembangunan sumberdaya manusia

maka suatu negara dapat menjadi negara maju. Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pemerintahan, terutama pemerintah desa. Pembangunan tidak semata mata dalam bentuk fisik saja namun pembangunan manusia juga harus diperhatikan, mengingat pelaku pembangunan fisik dan pelaku organisasi merupakan manusia. Dengan demikian pembangunan fisik maupun non fisik seharusnya dapat berjalan seiringan.

Menurut Sunyoto (2004:40) kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi (sekaligus politik). Pembangunan masyarakat desa terpadu hal yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk perdesaan serta memperkuat kemandirian. Terdapat empat elemen dasar dalam program pembangunan diantaranya adalah;

1. Pembangunan pertanian. Peningkatan produksi petanian dianggap sangat srategik, karena tidak hanya diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan (baik di perdesaan maupun di perkotaan), tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan dan kerumahtanggaan, serta untuk menghasilkan produk pertanian ekspor di negara maju.
2. Industrialisasi perdesaan. Tujuan utama program industri pedesaan adalah mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Industri

perdesaan merupakan alternative yang sangat strategi bagi upaya menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan di pedesaan.

3. Pembangunan masyarakat desa terpadu. Tujuan utama program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian.
4. Strategi pusat pertumbuhan. Strategi pusat pertumbuhan adalah pembuatan pasar dan distribusi hasil produksi. Pasar difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, sekaligus sebagai pusat informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehendak konsumen dan produsen.
5. Konsep Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan masyarakat Desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, tentunya memillii tujuan - tujuan yang tidak terlepas dari pembangunan secara keseluruhan. Karena kondisi perdesaan mempunyai sepesifikasi tertentu, baik dari segi sosial dan ekonomi maka tujuan pembangunan di perdesaan lebih sering ditekankan pada bidang ekonomi, sebab kondisi ekonomi ini lah yang pada umumnya sangat memperhatikan. Oleh karena itu tujuan jangka pendek lebih diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Menurut Khairudin (1992:68) mengtakan bahwa tujuan jangka pendek yang hendak dicapai adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa yang menciptakan situasi dan kondisi, kekuatan dan kemampuan desa dan masyarakat desa dalam suatu tingkat

yang lebih kuat dan nyata untuk tahap - tahap pembangunan selanjutnya. Disamping itu tujuan pokok untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, pembangunan sumber daya manusia mempunyai tujuan - tujuan yang sifatnya lebih strategis dan dapat mempercepat proses pembangunan desa, diantaranya adalah;

1. Mempelancar sarana hubungan komunikasi,
2. Meningkatkan dan menyempurnakan struktur organisasi,
3. Memberi gairah dan semangat hidup,
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat,
5. Menciptakan pendidikan secara merata, dan
6. Pengembangan teknologi

Proses pembangunan sumber daya manusia adalah suatu yang harus ada dan terjadi disuatu organisasi. Namun dalam pelaksanaannya pengembangan sumber daya manusia ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor, baik dari dalam diri organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi yang bersangkutan, Notoatmodjo 1992 (dalam lis Prasetyo: 2013:5). Berikut ini adalah faktor internal dan eksternal yang harus dipertimbangkan dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia;

1. Faktor Internal:

Faktor internal disini mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat dikendalikan baik oleh pimpinan maupun oleh anggota organisasi yang bersangkutan. Secara terinci factor-faktor tersebut antara lain:

- a. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Organisasi;
- b. Strategi Pencapaian Tujuan;
- c. Sifat dan Jenis Kegiatan;
- d. Jenis Teknologi yang Digunakan;

2. Faktor Eksternal:

Organisasi itu berada di dalam lingkungan dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana organisasi itu berada. Agar organisasi itu dapat melaksanakan misi dan tujuannya, maka ia harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan atau factor-faktor eksternal organisasi itu. Factor-faktor tersebut antara lain:

- a. Kebijakan Pemerintah;
- b. Sosio-budaya Masyarakat;
- c. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia

Hayat (2017: 22) mengatakan bahwa dalam konteks pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan dan peraturan yang ada. Dengan demikian melihat dari tingkat pendidikan masyarakat dan aparatur desa yang masih rendah, maka kebijakan pemerintah desa untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara melakukan pembangunan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Suatu kebijakan dibuat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada disuatu tempat atau lingkungan tertentu. Kebijakan publik juga diungkapkan oleh Lemieux (dalam Wahab, 2016: 15) yang

mengatakan kebijakan publik sebagai "Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang di lakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur.

Untuk menentukan sebuah program pemerintah desa dalam pembangunan sumber daya manusia, Kepala Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) harus bekerjasama dan saling membantu untuk menyusun sebuah program pembangunan yang memiliki orientasi terhadap perbaikan mutu hidup masyarakat desa. Kerjasama yang dilakukan tersebut menjadi upaya untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran pembangunan sumber daya manusia. Pemilihan pokok-pokok pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penetapan sebuah kebijakan sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat, dengan demikian masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan dapat menjadi masyarakat yang mandiri.

Hal tersebut nyatanya berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di Desa Tungkulrejo, yang mana LPMD masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan desa yang kali ini menjadi andalan kebanyakan desa di Kabupaten Ngawi. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan LPMD yang seharusnya dapat memberikan sesuatu untuk perubahan kehidupan masyarakat, namun nyatanya masih terlalu fokus terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur jalan desa. Dalam urusan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa Tungkulrejo melakukan kerja sama dengan Ulama Masyarakat, Ibu-ibu PKK

dan Pemuda Karangtaruna. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tungkulrejo dan perwakilan masyarakat yang mewakili masing-masing bidang yang ada di Desa Tungkulrejo. Dalam rapat untuk menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan menghasilkan sebuah kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pada rapat tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas pemerintah Desa dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Memberdayakan ibu-ibu PKK dan Karangtaruna untuk membuat kegiatan yang melibatkan masyarakat.
3. Pemberian insentif terhadap guru Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan anak Usia dini (PAUD) dan Taman Posiyandu.
4. Memberdayakan Ulama Masyarakat Desa untuk menjadi guru dalam kegiatan pendidikan Madrasah Diniyah (MADIN).

Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun sumber daya manusia yang berada di perdesaan yang mayoritas secara pendidikan masih rendah, maka diperlukan peran pemerintah desa yang mengarahkan kegiatan di perdesaan untuk hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas dari masyarakat desa. Dengan demikian desa dituntut untuk menjalankan pembangunan yang sifatnya membangun sumber daya manusia yang berada di desa, bukan hanya terfokus dalam pembangunan fisik (penyediaan

vaping jalan desa), artinya pembangunan fisik dan non fisik harus dapat berjalan dengan seimbang. Pembangunan di pedesaan yang mayoritas masyarakatnya secara pendidikan rendah dan secara ekonomi masih relatif miskin, kemudian desa tersebut mengutamakan pembangunan fisik maka yang terjadi dapat menimbulkan permasalahan baru yang diakibatkan oleh kesenjangan sosial. Karena dengan pembanguan fisik tersebut yang berpeluang untuk memanfaatkanya untuk membuat usaha adalah orang yang secara pendidikan dan ekonomi keluarga dianggap mampu untuk melakukan usaha tersebut. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang secara pendidikan dan pereknomianya masih rendah? Dengan hal ini masyarakat yang memiliki pendidikan dan ekonomi rendah cenderung tidak dapat berkembang atau meningkatkan kualitas hidup mereka, karena kalah saing dengan mereka yang memiliki pendidikan tinggi, kemampuan yang cukup dan perekonomian yang mumpuni dan stabil. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut maka pembangunan di perdesaan harus berjalan dengan seimbang antara pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan non fisik atau biasa yang disebut dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi beberapa kegiatan yang sudah sesuai dengan Pemendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, namun hal tersebut dinilai masi kurang karena hanya beberapa kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo

Dalam bagian kedua Pasal 06 Ayat 05 Permendagri no 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, diatur mengenai pembangunan Sumber Daya Manusia dalam poin pemberdayaan masyarakat yang mengatur tentang; Pertama Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, Kedua Pelatihan teknologi tepat guna, Ketiga Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa, keempat Peningkatan kapasitas masyarakat kader pemberdayaan masyarakat desa. Melihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan di desa tungkulrejo sudah beberapa yang sudah dilakukan dalam peningkatan pengetahuan dan kerukunan. Namun kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat masih belum terlihat. Pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa Tungkulrejo hari ini melihat dari RKPDes Tungkulrejo tahun 2017, dana yang digunakan pemerintah desa sebagian besar memang digunakan untuk pembangunan fisik desa (Pavingisasi jalan poros desa).

Pembangunan yang seharusnya dilakukan mengutamakan pembangunan sumber daya manusia atau paling tidak pembangunan fisik dan non fisik harusnya dapat berjalan beriringan, mengingat kualitas masyarakat yang ada di desa tungkulrejo mayoritas secara pendidikan dan ekonomi masih menengah ke bawah. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dapat berjalan dengan baik, pembangunan yang

seimbang antara pembangunan fisik dan non fisik. Dalam pembahasan yang peneliti uraikan juga kami mengacu atau membuat perbandingan pembangunan sumber daya manusia yang terjadi di desa tungkulrejo dengan para ahli untuk menjawab permasalahan yang ada, dalam pembahasan ini peneliti memperkuat pernyataan dalam pembangunan sumber daya manusia menurut Sunyoto.

Menurut Sunyoto (2004:40) kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi (sekaligus politik). Pembangunan masyarakat Desa terpadu hal yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk perdesaan serta memperkuat kemandirian.

a. Pembangunan pertanian

Pembangunan pertanian yang hendak dicapai adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan output dan pendapatan masyarakat. Fokusnya terutama terarah pada usaha menjawab kelangkaan atau keterbatasan pangan di pedesaan. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan (baik di perdesaan maupun di perkotaan), tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk menghasilkan produk pertanian ekspor di Negara maju.

Kegiatan tersebut sangat cocok jika dilakukan di Desa Tungkulrejo mengingat mayoritas masyarakat di Desa Tungkulrejo merupakan petani, namun kegiatan pertanian yang ada mayoritas adalah petani padi. Lahan sawah yang ada di Desa Tungkulrejo sejatinya dapat ditanami berbagai tanaman tidak hanya padi, seperti tanaman tembakau, jagung, melon, kedelai dan lain-lain yang dapat membuat variasi tanaman dan nilai jual yang tinggi. Untuk itu pelatihan pertanian di Desa Tungkulrejo ini, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa perlu dilakukan supaya masyarakat memiliki bekal pengetahuan ketika ingin menanam tanaman selain padi hal tersebut dilakukan untum meminimalisir terjadinya kegagalan dalam pergantian tanaman tersebut. Dalam kegiatannya Desa Tungkulrejo ternyata tidak melakukan kegiatan pelatihan mengenai pelatihan pertanian tersebut. Terdapat beberapa masyarakat desa yang mencoba mengganti tanaman padi mereka dengan tanaman melon, jagung dan lain - lain dan hasilnya tidak sedikit yang gagal, modal yang cukup besar yang dikeluarkan untuk menanam tanaman tersebut diharapkan mendapatkan hasil yang besar malah menjadi permasalahan sendiri bagi masyarakat. Untuk itu pelatihan pertanian terhadap masyarakat yang mayoritas adalah petani ini sangat penting untuk dilakukan.

b. Industrialisasi pedesaan.

Industri pedesaan memiliki tujuan utama program industri pedesaan adalah mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Industri pedesaan merupakan alternatif yang sangat strategi bagi upaya menjawab persoalan

semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan di pedesaan. Minimnya pelatihan - pelatihan mengenai mengembangkan keterampilan masyarakat desa membuat industri pedesaan di Desa Tungkulrejo tidak terlihat nampak, hanya saja masyarakat yang memiliki perekonomian cukup baik yang mampu menciptakan toko karena modal yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Untuk itu kegiatan yang dapat meningkatkan kerajinan perlu dilakukan agar dapat menciptakan penguatan industri pedesaan.

c. Pembangunan masyarakat desa

Tujuan utama program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Minimnya kegiatan yang berbasis untuk peningkatan pengetahuan dan kualitas masyarakat dan ketergantungannya pemerintah desa untuk mengadakan pelatihan yang bergantung terhadap pemerintah yang berada di atasnya membuat peningkatan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup dan memperkuat kemandirian sulit tercapai di Desa Tungkulrejo. Dalam hal ini kebanyakan masyarakat desa memilih untuk merantau ke kota-kota besar atau keluar pulau untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut dinilai lebih dapat meningkatkan perekonomian keluarga ketimbang harus membuka usaha di desa tanpa pengalaman dan pelatihan sebelumnya.

d. Strategi pusat pertumbuhan

Strategi pusat pertumbuhan adalah pembuatan pasar dan distribusi hasil produksi. Pasar difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, sekaligus sebagai pusat informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehendak konsumen dan produsen. Pusat pertumbuhan semacam ini diupayakan supaya dikembangkan sedemikian rupa sehingga secara sosial tetap dengan nuansa desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota.

Desa Tungkulrejo mempunyai pasar desa. Pasar desa tersebut diberi nama Pasar Kliwon. Setiap hari Kliwon (Bahasa Jawa) biasanya pasar tersebut ramai pengunjung, tetapi nampaknya pasar tersebut ternyata belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Desa Tungkulrejo. Masyarakat Desa Tungkulrejo sendiri yang harusnya memanfaatkan pasar tersebut untuk meningkatkan perekonomian namun disini masyarakat Desa Tungkulrejo menjadi pembeli bukan penjual. Hal tersebut sangat disayangkan adanya pusat pertumbuhan (pasar) ternyata belum mampu dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat desa.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Tujuan dari pembangunan sumber daya manusia di perdesaan ini menurut Khairudin (1992: 68) mengatakan "tujuan atau hasil pembangunan di perdesaan lebih sering ditekankan pada bidang ekonomi, sebab kondisi ekonomi yang pada umumnya sangat memerhatikan. Oleh sebab itu, tujuan jangka pendek lebih diarahkan pada peningkatan pada taraf hidup masyarakat". Adanya tujuan tersebut maka kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat

dapat menciptakan hasil untuk peningkatan taraf hidup seperti :

1. Mempelancar Sarana Hubungan dan Komunikasi.

Mempelancar sarana hubungan dan komunikasi ini diharapkan untuk dapat lebih membuka desa terhadap daerah sekitarnya sehingga tidak menjadi daerah yang tertinggal. Komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa Tungkulrejo, pemerintah desa sekitar serta pemerintahan yang lebih tinggi dapat membantu melepaskan status desa tertinggal ke tingkatan yang lebih baik. Desa Tungkulrejo juga selalu menjaga komunikasi yang baik, baik komunikasi kepada pemerintah yang ada di atasnya dan juga kepada desa yang ada disekitarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari Dapat digambarkan kegiatan yang mencerminkan komunikasi warga dengan pemerintah desa yang dilakukan yang melibatkan pemerintah yang ada di atasnya dan tugas pemerintah sekitar desa.

2. Meningkatkan dan Menyempurnakan Struktur Organisasi

Hasil pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh pemerintah desa diharapkan mampu untuk memperbaiki kinerja pemerintah desa untuk melayani masyarakat desa, karena secara umum pemerintah desa adalah yang paling dekat dengan masyarakatnya. Beberapa kegiatan berupa pelatihan yang diikuti desa ini namun prosesnya masih sangat lambat karena beberapa aparturnya masih belum dapat mengaplikasikan komputer secara baik, sehingga berdampak pada penyusunan RKPDes dan pengelolaan

dana desa kurang baik, Sehingga pelatihan yang telah dilaksanakan kurang dapat dirasakan manfaatnya.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan dalam peningkatan pendidikan Desa Tungkulrejo mulai berbenah untuk menciptakan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Pada tahun 2015 lalu Desa Tungkulrejo secara resmi mendirikan sebuah pendidikan Madrasah Diniah, Madrasah Diniah dibuat demi menyeimbangkan pendidikan anak antara pendidikan dunia dan khira. Dan hasil pembangunan masyarakat desa harusnya lebih ditekankan kepada peningkatan perekonomian masyarakat, karena dengan meningkatnya perekonomian masyarakat maka kesejahteraan sosial dapat terwujud. Mengingat di Indonesia masih banyak masyarakat yang kurang mampu di bidang ekonomi. Hasil dari pembangunan sumber daya manusia di perdesaan haruslah ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Pengembangan Teknologi

Melihat dari perubahan jaman yang cukup pesat, di era modern saat ini semua kegiatan menggunakan teknologi. Untuk itu masyarakat di perdesaan supaya tidak tertinggal dengan masyarakat kota, maka kegiatan pembangunan sumber daya manusia juga harus mengacu pada perkembangan teknologi. Dengan pemasangan wifi di kantor Desa Tungkulrejo membuat masyarakat desa dapat mengakses menggunakan internet, secara tidak langsung hal ini dapat

meningkatkan pengetahuan masyarakat desa mengenai dunia internet.

Pada dasarnya dalam tercapainya tujuan dari pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari faktor yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan yang dapat membangun sumber daya manusia. Faktor yang mendorong pembangunan sumber daya manusia terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini faktor internal dan eksternal yang mendorong dalam pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia;

1. Strategi Pencapaian Tujuan

Sebuah misi dan tujuan dalam sebuah organisasi mungkin saja bisa sama dengan organisasi yang lainnya, namun berkaitan dengan strategi untuk mencapai sebuah misi dan tujuan organisasi tersebut dapat berbeda-beda sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tungkulrejo untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia yaitu melakukan kerja sama dengan Ibu-ibu PKK, Pemuda Karang Taruna dan juga tokoh ulama masyarakat desa.

Pemerintah desa memberdayakan masyarakat untuk melakukan kegiatan dan untuk masyarakat juga. Adanya pendanaan untuk melakukan kegiatan, maka dengan demikian masyarakat yang diberi amanah oleh pemerintah desa secara tidak langsung dapat mengembangkan kemampuannya dan juga dapat mengembangkan kemampuan masyarakat lain melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Desa Tungkulrejo untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia melakukan kerja sama dengan Ibu-ibu PKK, Pemuda Karang Taruna dan juga

Tokoh Ulama masyarakat desa. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat tiga sifat dan jenis kegiatan yang mendorong pembangunan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo, sebagai berikut: Pertama kegiatan rutin seperti posyandu yang dilakukan setiap satu bulan sekali, Kedua pelatihan volley mulai dari usia dini setiap sore hari, Ketiga kegiatan perlombaan yang selalu rutin diadakan setiap saat peringatan hari kemerdekaan.

2. Kegiatan yang menjadi kebutuhan

Pembangunan sumber daya manusia sifat dan jenis kegiatan sangat penting untuk mendorong terjadinya proses pembangunan sumber daya manusia. Di Desa Tungkulrejo sendiri sifat dan jenis kegiatan untuk membangun sumber daya manusia telah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Terdapat tiga sifat dan jenis kegiatan yang mendorong pembangunan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo, berikut ini penjelasannya;

a. Kegiatan Rutin

Kegiatan rutin yang terdapat di Desa Tungkulrejo ini rupanya dapat meningkatkan partisipasi yang tinggi terhadap kegiatan yang dilakukan atau yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam rangka mengembangkan masyarakat desa. Kegiatan rutin yang dimaksud disini adalah Pertama kegiatan posiyandu yang dilakukan setiap satu bulan sekali Kedua kegiatan pelatihan volley mulai dari usia dini setiap sore hari Ketiga kegiatan perlombaan yang selalu rutin diadakan setiap saat peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Kempat kegiatan pendidikan anak.

b. Kegiatan yang menjadi kebutuhan
Dalam hal ini kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat menjadi

hal yang paling banyak mengundang partisipasi masyarakat, karena dengan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut secara tidak langsung mengundang masyarakat untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan kebutuhan masyarakat yang dimaksud adalah Pertama Kegiatan yang meningkatkan kualitas masyarakat seperti pelatihan dan penyuluhan, Kedua Kegiatan yang dapat meningkatkan pendidikan anak (Pendidikan TK, PAUD, Taman Posyandu dan Madrasah Diniya) Ketiga Kegiatan yang dapat meningkatkan atau menjaga kesehatan masyarakat.

c. Kegiatan yang melibatkan secara substantif.

Dalam partisipasi masyarakat juga terdapat kegiatan yang dalam pelaksanaannya dipaksakan, hal ini biasanya terjadi ketika suatu pemerintah memberikan amanah kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu dan masyarakat tersebut diberi dana untuk melaksanakannya. Di Desa Tungkulrejo sendiri hal demikian terjadi pada Ibu-ibu PKK, Pemuda Karangtaruna dan juga guru - guru (TK, PAUD, Taman Posiyandu dan Madrasah Diniyah) mereka dituntut untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan dengan bidangnya masing-masing.

3. Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan untuk dapat terlaksananya suatu kegiatan yang ditujukan terhadap masyarakat, tanpa adanya partisipasi masyarakat maka kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Partisipasi masyarakat di desa tungkulrejo sendiri sudah cukup bagus

hal tersebut terbukti dengan terealisasinya kegiatan - kegiatan yang di lakukan oleh pihak desa dengan di hadiri atau terlibatnya masyarakat dalam kegiatan tersebut.

4. Pendanaan Kegiatan

Suatu kegiatan pendanaan menjadi hal yang utama untuk selalu diperhatikan, tanpa adanya dana maka suatu kegiatan akan sulit untuk dapat terlaksana mengingat suatu hal membutuhkan pembiayaan. Di Desa Tungkulrejo sendiri juga memberikan pendanaan kepada masing - masing pelaksana kegiatan untuk dapat menjalankan suatu kegiatan. Berikut ini pendanaan yang di berikan oleh pihak pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di desa tungkulrejo: Pertama Pendanaan untuk Ibu-ibu PKK tahun anggaran 2017 berjumlah sebesar Rp 19.520.000. Kedua Pendanaan untuk Pemuda Karangtaruna. tahun anggaran 2017 berjumlah sebesar Rp. 3.000.000. Ketiga Pemberian insentif kepada guru TK Rp. 3.600.00 di bagi 2 orang pengajar, guru PAUD Rp. 3.600.000 dibagi 3 orang pengajar dan guru Taman Posiyandu sebesar Rp. 1.500.000 untuk 5 orang pengajar. keempat Pendanaan untuk pendidikan Madrasah Diniyah (MADIN) sebesar Rp. 3.000.

5. Kerjasama Dengan Pihak Lain.

Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan maka suatu organisasi bisa melakukan kerjasama atau bantuan dari pihak lainnya, pihak lain bisa berupa pemerintah yang ada di atasnya, lembaga yang terdapat di dalam atau di luar pemerintah toko masyarakat dan lain-lain. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sumber daya manusia

pihak pemerintah desa juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mewujudkan pelaksanaan apa yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa tungkulrejo sendiri bekerjasama dengan pemerintah yang ada di atasnya (Pemerintah kecamatan, kabupaten Ngawi dan pemerintah diluar kabupaten ngawi).

Dalam sebuah kegiatan pastinya tidak ada yang sempurna, faktor penghambat juga sering hadir dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan. Faktor penghambat merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap kesuksesan pelaksanaan atau suatu kegiatan yang dilakukan. Faktor yang menghambat pembangunan sumber daya manusia juga dapat terjai dari sisi internal dan juga eksternal. Begitu juga di Desa Tungkulrejo terdapat faktor internal dan eksternal yang menghambat pembangunan sumber daya manusia, diantaranya adalah;

1. Visi, Misi dan Sasaran Tujuan Organisasi

Sebuah organisasi tentunya pasti memiliki misi tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut pastinya diperlukan rencana yang baik diikuti oleh pelaksanaanya yang maksimal. Nampaknya dari segi tujuan organisasi pemerintah desa menjadi salah satu penyebab terjadinya penghambatan pembangunan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo. mengingat untuk tahun 2017 pemerintah desa memilih mengutamakan pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan non fisik, sehingga tujuan organisasi desa ini juga menjadi faktor yang menghambat

terjadinya pembangunan sumber daya manusia yang ada.

2. Jenis Teknologi Yang Digunakan

Berkembangnya jaman yang semakin hari semakin maju membuat pemerintah Desa Tungkulrejo untuk dapat menggunakan teknologi yang sudah maju maupun yang masih sederhana. Melihat kondisi semacam ini menuntut pemerintah desa untuk mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat menangani dan juga mengoperasikan teknologi tersebut. Untuk pengendalian teknologi yang sudah maju maupun yang belum maju ternyata menjadi kendala tersendiri, faktanya dengan menggunakan teknologi yang maju (canggih) pemerintah dan masyarakat cukup kesulitan karena kemampuan dan keahlian yang dimiliki masih tergolong kurang. Sedangkan jika menggunakan teknologi yang sederhana juga memiliki kendala prosesnya lama yang mengakibatkan terbuangnya waktu.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan rupanya juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber daya manusia yang terjadi di Desa Tungkulrejo ini. pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini ternyata dicontoh dengan baik oleh pemerintah Desa Tungkulrejo, namun permasalahannya adalah pemerintah Desa Tungkulrejo tidak mampu menyeimbangkan pembangunan fisik dan non fisik, sehingga hal tersebut menjadi suatu penghambat terjadinya pembangunan

sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo ini.

4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi diluar pemerintahan desa pada dewasa ini telah berkembang semakin pesatnya, dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nyatanya bisa memperlambat pembangunan sumber daya manusia yang ada di Desa Tungkulrejo. Melihat dari pendidikan, usia dan kemampuan pemerintah desa dan juga masyarakat di Desa Tungkulrejo yang masih menengah kebawah dalam segi pendidikan dan kemampuan dan usia yang sudah terbilang cukup umur, ternyata pemerintah dan masyarakat desa cukup kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini.

5. Alokasi dana Kegiatan

Alokasi dana dalam pelaksanaan suatu kegiatan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat terealisasinya kegiatan tersebut. Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo, memang pada dasarnya sudah memiliki dana masing masing, namun dana desa yang ada untuk kegiatan tersebut tidak terlalu banyak. Sehingga dana yang ada dinilai masih kurang untuk melakukan kegiatan yang dapat membangun sumberdaya manusia yang ada, hal tersebut mengakibatkan kegiatan pembangunan sumber daya manusia yang ada di Desa Tungkulrejo terlihat cenderung biasa-biasa saja. Melihat dari jumlah dana yang diterima Desa Tungkulrejo di tahun ini cukup besar Rp.1.612.386.000 seharusnya jika dikelola dengan baik

maka tidak ada permasalahan dalam pemberian kegiatan yang berbasis meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Desa Tungkulrejo.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan dari Implementasi Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi yaitu; Peran pemerintah desa dalam pembangunan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo, telah membuat kebijakan mengenai kegiatan - kegiatan yang dapat membangun sumber daya manusia yang ada. Untuk menjalankan kegiatan tersebut yang seharusnya pemerintah desa bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), namun nyatanya hal tersebut tidak nampak, yang terjadi adalah pihak desa bekerjasama dengan PKK, Karangtaruna dan tokoh masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia. Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo telah berjalan sesuai dengan rencana kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Tungkulrejo. Pembangunan sumber daya manusia dalam segi pendidikan telah berjalan mulai dari usia dini, begitu juga kegiatan yang dilakukan oleh Ibu-Ibu PKK dan juga Pemuda Karangtaruna. Namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut belum mampu memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian masyarakat Desa Tungkulrejo, karena minimnya pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan perekonomian terhadap masyarakat. Pelaksanaanya juga

terdapat faktor internal dan eksternal yang mendorong dan menghambat pembangunan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo; Strategi pencapaian tujuan, kegiatan yang menjadi kebutuhan, partisipasi masyarakat, pendanaan kegiatan dan kerjasama dengan pihak lain. Sedangkan faktor yang menghambat adalah; visi, misi dan sasaran tujuan organisasi, teknologi yang digunakan, kebijakan pemerintah pusat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan alokasi dana kegiatan.

Saran

Pemerintah Desa Tungkulrejo, hendaknya melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam rangka untuk melakukan kegiatan yang dapat membangun sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo. Aparatur Desa Tungkulrejo juga sebaiknya melakukan kegiatan pembangunan yang seimbang antara pembangunan fisik dan non fisik supaya tidak menimbulkan kesenjangan sosial masyarakat. Kemudian untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Desa Tungkulrejo pemerintah desa juga sebaiknya melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat seperti halnya pelatihan di bidang pertanian, pelatihan untuk industri perumahan, pemanfaatan pasar desa dan pelatihan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang positif terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pelaksanaanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, Masykuri. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Malang: Visipress.
- H, Khairudin. (1992). Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Liberti Yogyakarta.
- Hasil Musrenbangdes Desa Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi tahun 2018.
- Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. (2013). Wawancara, Observasi dan Focus Groups. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Institute for Research and Empowerment. (2015). Policy Brief: Mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan Desa. Yogyakarta: IRE
- Moleong, Lexy. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant; Dwijowijoto. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Prastyo, lis. (2013) Pengembangan Sumber Daya Manusia Startegis Dalam Organisasi Pendidikan Luar Sekolah. Artikel online: <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files//PSDM%20STRATEGIS%20PLS.pdf> diakses tanggal 13, November 2017.
- RKPDDes desa Tungkulrejo Kecamatan Padas kabupaten Ngawi Tahun 2017
- Siagian. S. P. (2001). Administrasi Dan Pembangunan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
- Ulum, Robitul. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, (studi kasus di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang) Jurusan Ilmu administrasi Negara Universitas Islam Malang.
- Undang-Undang No 06 tahun 2014 tentang Desa Mandiri
- Usman, Sunyoto. (2004). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Wijaya, Rahmin. (2016). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. (Studi Pada Desa Pandan Landung Kecamatan Wagir Kabupaten Malan). Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Malang.
- Wahab, Sholichin Abdul. (2016). Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.